



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat



Reviu Kinerja Anggaran Program KKBPk Tahun Anggaran 2017 Dan Strategi Program KKBPk Ke Depan

Plt. Kepala BKKBN
SIGIT PRIOHUTOMO

Pada:
**Pertemuan Lengkap Struktural dan Fungsional BKKBN
Senin, 8 Januari 2018**

**Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2018**



18th ASIAN GAMES
**Jakarta
Palembang
2018**

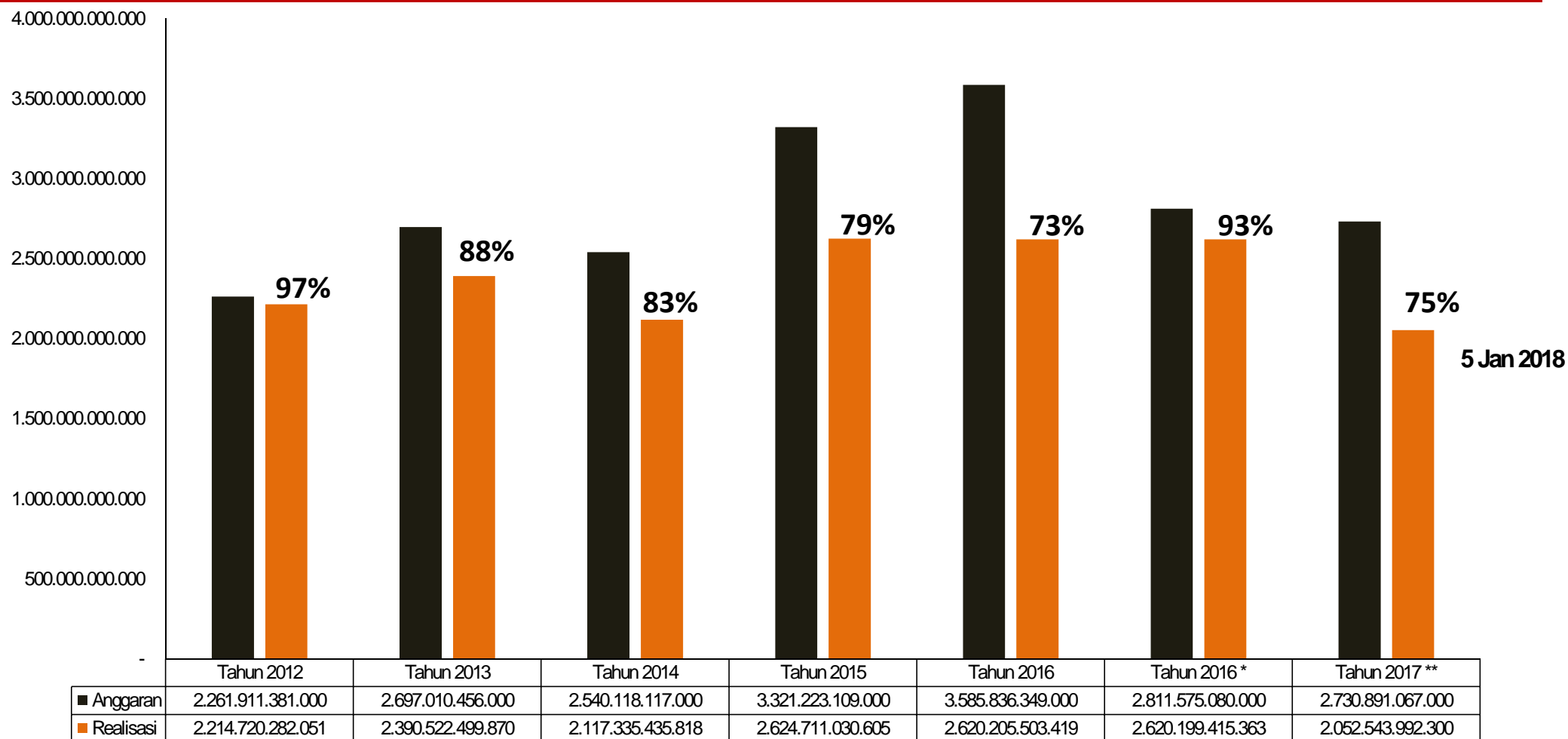
SISTEMATIKA PENYAJIAN

- 1. REALISASI ANGGARAN 7 TAHUN TERAKHIR;**
- 2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TA 2017;**
- 3. POSTUR APBN 2018 TERMASUK DAK (FISIK DAN NON FISIK);**
- 4. PENUTUP**



1. REALISASI ANGGARAN 7 TAHUN TERAKHIR

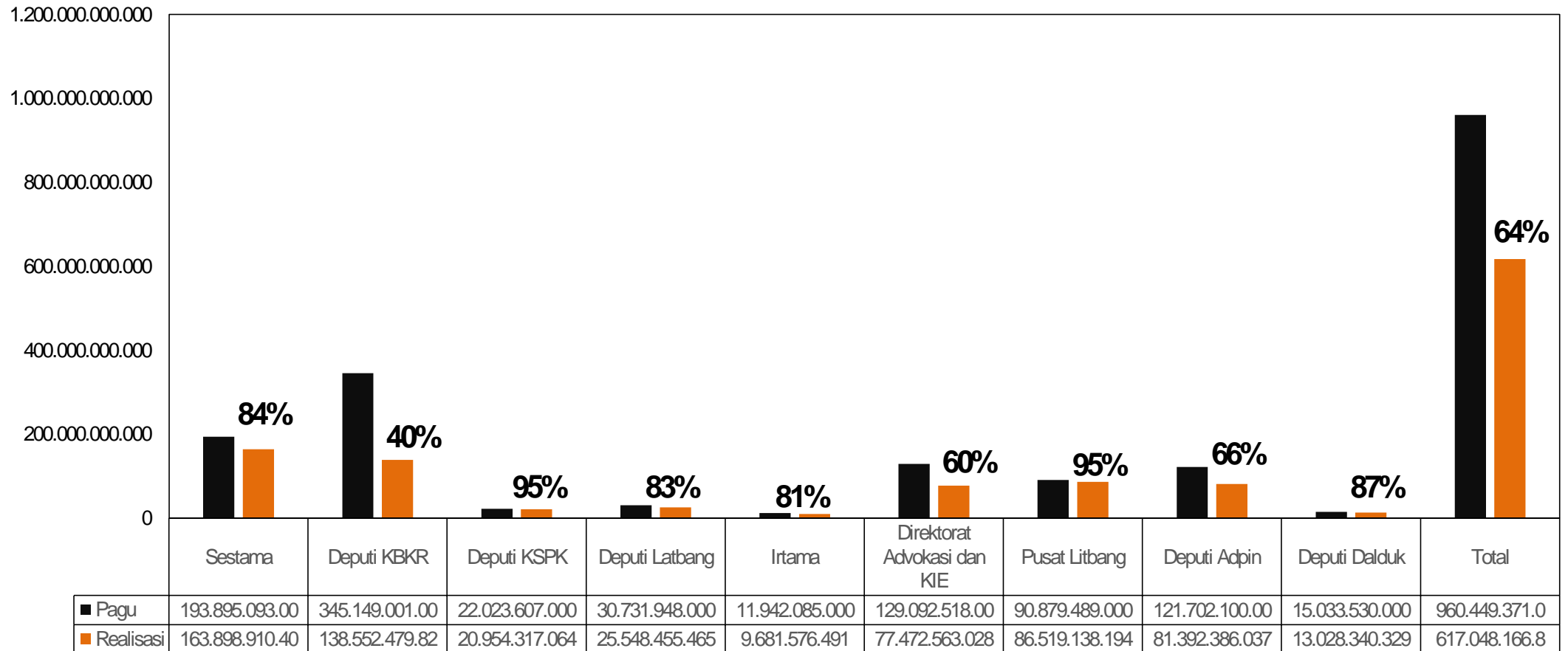
SANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI TA 2012-2017



Ket: *) Pagu dan realisasi tahun 2016 setelah dilakukan *selfblocking*

***) Berdasarkan APBN-P/*Selfblocking* TA 2017

REALISASI ANGGARAN SATKER DI PUSAT PER 5 JANUARI 2018



Sumber: Smart s.d 5 Jan 2018

REALISASI ANGGARAN DI PROVINSI (S.D. 5 JANUARI 2018)

*Realisasi anggaran tertinggi
adalah Provinsi Maluku Utara
sebesar 94.22% dan terendah
adalah Provinsi Sumatera
Utara sebesar 71.58%*

Sumber: Smart 5 Januari 2018

Nama Lokasi	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
	(Rp.)	(Rp.)	(%)
07 SUMATERA UTARA	77.135.333.000	55.214.725.885	71,58
24 NUSA TENGGARA TIMUR	53.923.060.000	39.277.178.459	72,84
05 JAWA TIMUR	127.556.253.000	93.750.816.394	73,5
10 JAMBI	41.288.885.000	30.503.887.147	73,88
33 PAPUA BARAT	36.175.298.000	27.260.945.831	75,36
18 SULAWESI TENGAH	41.643.464.000	31.683.756.903	76,08
02 JAWA BARAT	160.375.287.000	123.757.419.444	77,17
12 LAMPUNG	64.257.445.000	50.299.588.168	78,28
03 JAWA TENGAH	133.777.898.000	105.219.686.788	78,65
25 PAPUA	61.422.337.000	48.421.727.801	78,83
04 DI YOGYAKARTA	36.468.950.000	28.892.411.335	79,22
06 ACEH	59.166.157.000	47.139.919.901	79,67
09 RIAU	48.283.805.000	38.893.422.183	80,55
01 DKI JAKARTA	28.043.144.000	22.882.481.760	81,6
08 SUMATERA BARAT	51.261.870.000	41.840.042.284	81,62
11 SUMATERA SELATAN	65.121.244.000	53.174.702.809	81,65
22 BALI	34.611.972.000	28.444.173.559	82,18
16 KALIMANTAN TIMUR	43.771.798.000	36.562.544.867	83,53
13 KALIMANTAN BARAT	46.483.450.000	38.870.881.352	83,62
14 KALIMANTAN TENGAH	38.487.977.000	32.283.331.528	83,88
30 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	27.271.800.000	22.931.060.761	84,08
29 BANTEN	48.201.485.000	41.124.854.033	85,32
26 BENGKULU	39.226.898.000	33.616.949.443	85,7
21 MALUKU	36.760.917.000	31.888.471.401	86,75
17 SULAWESI UTARA	47.085.337.000	40.893.249.190	86,85
23 NUSA TENGGARA BARAT	40.151.931.000	35.140.357.780	87,52
15 KALIMANTAN SELATAN	41.923.086.000	36.877.476.568	87,96
31 GORONTALO	30.099.446.000	26.809.499.514	89,07
20 SULAWESI TENGGARA	42.125.399.000	37.775.731.557	89,67
32 KEPULAUAN RIAU	29.068.663.000	26.459.614.781	91,02
34 SULAWESI BARAT	29.051.615.000	26.529.509.077	91,32
19 SULAWESI SELATAN	68.820.081.000	63.291.801.851	91,97
28 MALUKU UTARA	40.100.009.000	37.783.605.102	94,22



2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TA 2017

CAPAIAN KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG ADPIN TAHUN 2017

IKU	KINERJA (%)		%	FAKTOR PENGHAMBAT	KET
	TARGET	CAPAIAN			
1. WUS yang mengadopsi norma anak ideal	60				Data belum tersedia
2. Remaja yang yang mengadopsi norma Usia Kawin ideal	69	64,8	93,90	Masih adanya faktor budaya dan agama di beberapa tempat	S. RPJMN
3. Potensial demand	14.2	14,5	97,93	Belum optimalnya akses pelayanan KB di DTPK	SDKI
4. Pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan	25	27,75	111		S. IKK



KOMPONEN	ANGGARAN 2017			FAKTOR PENGHAMBAT
	PAGU	REALISASI	%	
DITVOKKOM	129.092.518.000	121.345.682.482	94,00	Setelah masa perpanjangan kontrak, pekerjaan belum selesai dan harus memenuhi persyaratan adanya garansi bank. Namun persyaratan tsb tdk bisa dipenuhi pada waktu yg ditentukan pada tgl 22 Des 2017. Pada tgl 28 Des, pengajuan SPM dengan lampiran garansi bank ditolak.
KOMPONEN	ANGGARAN 2017			FAKTOR PENGHAMBAT
	PAGU	REALISASI	%	
DITBINHUB	5.457.427.000	5.273.653.423	96,63	1. Optimalisasi anggaran sisa pengadaan integrasi kampung KB bersama mitra baru disetujui pada tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp. 7 Milyar. 2. Adanya kekosongan pejabat untuk ttd Perka sehingga perka tidak dapat dicetak 3. Optimalisasi anggaran sisa pengadaan reengineering vicon NKKBS baru disetujui pada awal Des 2017
DITBINLAP	83.550.165.000	73.195.650.231	87,61	
DITLAPTIK	5.522.510.000	4.563.724.909	82,64	
DITTFDOK	27.171.998.000	25.015.262.017	92,06	
TOTAL	121.702.100.000	108.048.290.580	88,78	

CAPAIAN KINERJA UTAMA DAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL KEDEPUTIAN BIDANG KSPK TAHUN 2017

Sasaran: Meningkatnya Ketahanan Keluarga guna mewujudkan Keluarga Berkualitas

I	Indikator Kinerja Utama	TARGET KINERJA			CAPAIAN	SUMBER DATA
		2015	2016	2017	2017	
1	Persentase Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS)	17.0%	16,5%	16.0%	16.69% (10.308.935)	PK
2	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi Ibu dan atau sedang hamil anak pertama	9.45%	9.25%	9.20%	6,4%	RPJMN 2017
3	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	20,6	20,7	20,8	20	RPJMN 2017
II Realisasi Anggaran		PAGU		REALISASI		%
Kedeputian KSPK		22.023.607.000		21.503.593.656		97,88
Bidang KSPK Propinsi		-		-		-

III. Kegiatan Prioritas Nasional 2018

1. Akselerasi peningkatan perbaikan gizi dalam rangka penurunan stunting

Sasaran	Keluarga yang memiliki anak usia di bawah sampai usia 2 tahun (Jumlah Keluarga Baduta 6.551.121)
Lokasi	34 Provinsi, 100 Kabupaten/Kota, 1000 Desa yang akan dijadikan kampung KB

2. Peningkatan promosi dan pembinaan keluarga yang memiliki lansia dan rentan melalui bkl

Sasaran	Jumlah Keluarga yang Memiliki Lansia dan Rentan Ikut BKL sebanyak 1.467.661 Keluarga
Lokasi	34 Provinsi

dALDUK

KBKR

LATBANG

Capaian Output dan Realisasi Anggaran Unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Utama TA 2017 (s.d 31 Desember 2017)

Pencapaian Kinerja

64.15%

Cukup

Permasalahan

- Penyerapan anggaran terkendala dengan anggaran yang tidak sesuai target diakibatkan adanya sisa anggaran layanan perkantoran (belanja pegawai dan belanja pemeliharaan rutin perkantoran);
- Penghematan APBN-2017 mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan

Penyerapan
88.8%

Konsistensi atas
RDP awal
100%

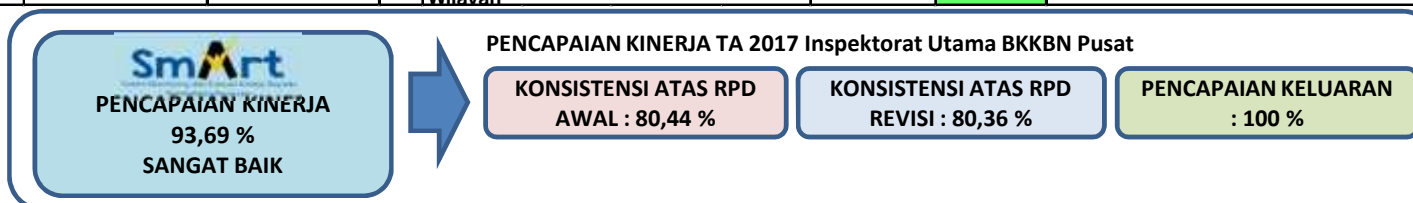
Konsistensi atas
RDP revisi
100%

Pencapaian
keluaran
85.82%

Unit Kerja Es II	Anggaran			Output		
	Pagu	Total Realisasi sd 31 Des 2017	Total Realisasi sd 31 Des 2017	Target	Total Realisasi sd 31 Des 2017	Total Realisasi sd 31 Des 2017
	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(volume)	(volume)	(%)
BIHOM	6.845.852.000	6.787.737.912	99,15	8	7,6	95
BIKUB	11.391.957.000	10.685.027.362	93,79	1	1	100
BIREN	8.670.579.000	7.991.722.909	92,17	4	4	100
BIPEG	6.869.610.000	6.818.014.040	99,25	3.578,00	3.993,00	111,6
BIRUM (Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtangaan)	44.218.136.000	39.934.055.819	90,31	12	8	66,67
BIRUM (Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtangaan)	115.898.959.000	99.960.023.372	86,25	12	8	66,67
SESTAMA	193.895.093.000	172.176.581.414	88,8	3.615,00	4.020,60	111,25

CAPAIAN TAHUN 2017 DAN ANGGARAN 2018

No.	PROGRAM/ UNIT ES.1	SASARAN PROGRAM / SASARAN UNIT ES.1 (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET/ SASARAN	CAPAIAN	PENJELASAN	
				2017			
1	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK	1	Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit	10 % (dari satker yang diaudit)	1,02%	Pagu Satker yang diperiksa BPK senilai Rp. 153,1 M, dengan temuan sebesar Rp. 1,56 M
			2	Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi	34 Prov	34 Prov	Tercapai dengan Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
2	Inspektorat Utama	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran	F.1	Persentase penurunan temuan eksternal	55%	96,48%	Temuan Th 2015 Rp. 44M, Temuan Th 2016 Rp. 1,5M, sehingga menurun Rp. 42,5 M (Rp. 96,48 M)
			F.2	Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	85%	73%	Belum ada penilaian dari BPKP, perhitungan berdasarkan penilaian BPKP tahun 2016 (2,20 sedangkan target kita 2,55 pada tahun 2017)
			F.3	Persentase Satuan Kerja Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah	85%	100%	Dari 14 Satker yang dinilai telah memiliki angka >50



NO.	KOMPONEN	2017		%	PAGU 2018
		PAGU	REALISASI		
1	Inspektur Wilayah I	3.559.061.000	3.241.815.029	91,09	4.433,50
2	Inspektur Wilayah II	3.989.708.000	3.859.223.075	96,73	4.433,50
3	Inspektur Wilayah III	4.393.316.000	4.057.914.000	92,37	4.733,00
	TOTAL ITTAMA	11.942.085.000	11.158.952.104	93,39	13.600,00



3. POSTUR APBN 2018 TERMASUK DAK (FISIK DAN NON FISIK)

TARGET SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2017 TERHADAP CAPAIAN SDKI 2017



TFR

2.33



2.4



mCPR (%)

60.9



57,2



Drop out (%)

25.3



28,8



Unmet Need (%)

10.26

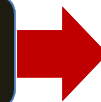


10,6



MKJP (%)

21.7



23,4



SANDINGAN APBN 2017 DAN PAGU ANGGARAN 2018

(dalam juta rupiah)

No.	Program/Satker	2017	2018	Selisih (2018-2017)
A. Berdasarkan Program				
1.	<u>Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</u>	768.753,30	2.963.061,70*	2.194.308,40
2.	Program Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	17.600,00	17.600,00	0
3.	Program Pelatihan, Penelitian & Pengembangan serta Kerjasama Internasional	296.011,10	264.256,40	-28.361,20
4.	Program Kependudukan, KB & Pembangunan Keluarga	2.328.227,30	2.299.866,10	-31.754,70
TOTAL		3.410.591,70	5.544.784,30	2.134.192,60
B. Berdasarkan Satker Pusat-Provinsi				
1.	Satker di Pusat	1.325.770,2 (39%)	577.822,1 (10%)	-747.948,11
2.	Satker di Provinsi	2.084.821,5 (61 %)	4.966.962,3 (90%)**	2.882.140,8
TOTAL		3.410.591,60	5.544.784,3	2.134.192,7

Ket:* Termasuk belanja gaji 15.352 tenaga PKB/PLKB; **) Termasuk belanja gaji pegawai dan belanja alat & obat kontrasepsi 17

**SANDINGAN APBN 2017 DAN PAGU ANGGARAN 2018:
BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I
(DALAM RIBU RUPIAH)**

NO.	UNIT ES 1	ANGGARAN 2017	PAGU ANGGARAN	SELISIH
		(DIPA AWAL)	2018	(2018-2017)
1.	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	101.511.200	134.652.638	33.141.438
2.	Deputi Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	1.018.380.425	1.135.825.564	117.445.139
3.	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga	268.828.500	234.855.230	-33.973.270
4.	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, Dan Informasi	939.507.166	794.532.668	-144.974.498
5.	Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, Dan Pengembangan	296.011.100	264.256.496	-31.754.604
6.	Sekretariat Utama	768.753.274	2.963.061.741	2.194.308.467
7.	Inspektorat Utama	17.600.000	17.600.000	0
	Jumlah	3.410.591.665	5.544.784.337	2.134.192.672

KEGIATAN, SASARAN & JUMLAH DAK FISIK SUB-BIDANG KB TA 2018

NO	KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH
1	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB a) Pengadaan Obgyn Bed b) Pengadaan IUD KIT c) Pengadaan Implant KIT d) Pengadaan Tempat penyimpanan kit/ alat dan obat kontrasepsi	Faskes	24.312
2	Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi	OPD KB	508
3	Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB a) Pengadaan Kendaraan distribusi alokon b) Pengadaan Kendaraan jemput antar calon akseptor c) Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB	OPD KB	508
4	Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB	OPD KB	508
5	Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan a) Pengadaan KIE Kit b) Pengadaan Genre Kit	Kelompok	5.157
6	Pengadaan Media/Alat Pengolah Data a) Pengadaan Personal Computer b) Pengadaan LCD Proyektor c) Pengadaan Note Book/Laptop	Balai Penyuluhan	5.157
7	Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB	Kecamatan	7.116
8	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB a) Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB dan Koord. Lapangan KB b) Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD c) Pengadaan Sepeda Motor	PLKB	15.432

KEGIATAN, SASARAN DAN DANA BOKB TA 2018 MENURUT WILAYAH

NO	KEGIATAN	PEMANFAATAN	SASARAN	JUMLAH
1	OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB	a). Biaya operasional penyuluhan KB; b). Biaya operasional pengolahan data; c) <i>Staff meeting</i> ; d). rapat teknis; e). Alat Tulis Kantor; f). Biaya langganan daya dan jasa; dan g). Biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB	BALAI PENYULUHAN	5.157
2	OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON	a). Biaya Bahan Bakar Minyak; b). Biaya jasa pengiriman/ekspedisi; c).Uang transport; d). Biaya pengepakan dan e). Konsumsi	FASKES	24.312
3	OPS. PENGGERAKAN PROGRAM KB DI KAMPUNG KB	a). Pertemuan Pokja di Kampung KB; b). Biaya operasional forum musyawarah tingkat desa kampung KB ; c). Lokakarya mini tingkat desa dan kecamatan di kampung KB dan d). Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan	KECAMATAN	7.116
4	OPS. PEMBINAAN PROGRAM KB BAGI MASYARAKAT OLEH KADER (per bulan)	a). Uang tranport dan b) konsumsi	KEL DAN DESA	82.917
5	KIE DAN MANAJEMEN	a). Honor pengelola keuangan BOKB; b). Dukungan administrasi (ATK dan penggandaan); c). Rapat/pertemuan/rakor/sosialisasi/monev; d). Pembinaan administrasi pengelolaan prog & anggaran dan e). Dukungan utk media KIE	OPD KB	508



4. KESIMPULAN

KESIMPULAN

1. Realisasi anggaran APBN-P TA 2017 sebesar 75% merupakan **kinerja anggaran TERENDAH selama 7 tahun terakhir**;
2. Identifikasi permasalahan terhadap capaian realisasi anggaran TA 2017 perlu disikapi dengan rumusan rencana aksi dan **tindak lanjut yang bersifat SEGERA**;
3. Satu indikator program KKBPK 2017 menurut data SDKI 2017 telah tercapai, yaitu penggunaan MKJP. Perlu dilakukan **intensifikasi dan pendekatan inovasi** untuk mengejar ketertinggalan capaian di tahun 2018;
4. Postur APBN 2018 menunjukkan kenaikan anggaran sebesar **Rp. 2.1 triliun** dari pagu anggaran tahun 2017 untuk belanja gaji 15.352 tenaga PKB/PLKB sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Proporsi APBN 2018 sebesar 10 dan 90% antara Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi menuntut perhatian khusus **penetapan tata laksana (regulasi) dan mengaktifkan peran Pembina Wilayah** di masing-masing provinsi;
6. Anggaran DAK fisik dan non fisik TA 2018 memberikan ruang gerak yang menjanjikan untuk peningkatan operasional program KKBPK di lapangan. Perlu aktivasi **peran Tim Pengendali DAK Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi untuk mengoptimalkan pemanfaatan DAK**. Namun tetap diperlukan strategi mengurangi dependensi APBD terhadap APBN untuk operasionalisasi program KKBPK di kab/kota.



Terimakasih..

2 Anak
Cukup